B A B IV

ANALISA

PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK AL-FARABI DAN IBNU BAJJAH

A. Negara Utama

Islam merupakan agama Universal yang memberikan pedoman setiap aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya juga aspek kehidupan bernegara. Khusus mengenai kehidupan bernegara, Islam memberikan pedoman dengan amat global, hanya diajarkan prinsip-prinsipnya guna memberi kesempatan bagi interpretasi dan perkembangan masyarakatnya, sesuai dengan kebutuhan hidup yang senantiasa berkembang. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran dalam bidang kehidupan politik memperoleh ruang gerak yang sangat luas.

Dalam kehidupan bernegara antara al-Farabi dan Ibnu Bajjah memiliki persamaan dan perbedaan, terutama pendapatnya tentang negara utama. Adapun pendapat al-Farabi tentang negara utama adalah tidak ubahnya sebagai susunan tubuh manusia yang sehat dan sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha dan bekerja untuk menyempurnakan dan memelihara segala hidup bersama. Sebagaimana halnya tubuh manusia dan kesanggupannya, diatas semuanya ada suatu anggota yang merupekan kepala seluruh anggota : hati, demikian dengan negara, masing-masing rakyatnya mempunyai tugas dan kepandaian yang berbeda-beda, yang dipimpin oleh seorang pemimpin negara. Sedangkan yang lainnya membuatnya dalam

berbagai kedudukan.¹

Negara utama dapat juga dikatakan sebagai sebuah negara model yang mewujudkan segala keutamaan hidup atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara utama digambarkan sebagai hasil suatu proses, sejak dari masyarakat non modern, primitif, kemudian memasuki tahap peralihan dan akhirnya sampai ketahap kematangan.²

Kalau sudah tercipta suatu kerjasama yang baik antara rakyat dan pimpinan rakyat, maka akan diperoleh suatu kebahagiaan dan kemakmuran didalam suatu negara tersebut. Adapun kebahagiaan yang dimaksud disini, adalah jika jiwa manusia menjadi sempurna didalam kehidupannya, dimana ia membutuhkan apapun eksistensinya, kepada suatu materi, ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya.

Kebahagiaan adalah tema sentral ilmu politik al-Farabi. Tema ini menentukan sifat, ruang lingkup, fungsi dan tujuan ilmu politiknya. Kebahagiaan hakiki menurut al-Farabi hanya dapat dicari melalui kebajikan dan kebaikan dan serta hal-hal yang luhur(mulia), seperti halnya, kesehatan, kehormatan dan kesenangan, serta menanamkan dan memberikan bimbingan pada masyarakat akhlak yang baik.³

---

¹ Abdul Qadir Jaelani, Negara Ideal (menurut konsepsi Islam), PT. Bina Ilmu, Cet. I, Surabaya, 1995, hlm. 8-9.

² M. Dawam Raharja, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa, PT. Mizan, Cet. III, Bandung, 1996, hlm. 433-444.

³ Osman Bakar, Hirarki Ilmu (membangun rangka pikir Islamisasi ilmu), PT. Mizan, Cet. I, Malaysia, 1997. hlm. 167

Sedangkan pendapat Ibnu Bajjah mengenai negara utama adalah bahwa ia lebih menekankan pada masyarakat dan warga negaranya, dimana apabila masyarakat dalam suatu negara sudah merasakan kebahagiaan, ketentraman, serta penindasan, maka Ibnu Bajjah dapat mengatakan bahwa negara tersebut adalah negara utama. Dengan demikian negara utama adalah negara yang benar-benar sempurna tanpa ada kekurangan dalam suatu negara tersebut karena negara itu sudah merasakan kebahagiaan didalam hidupnya.⁴

Dari latar belakang di atas, menunjukkan bahwa pendapat antara keduanya mengenai negara utama hampir sama, yang penting negara yang mampu menciptakan kebahagiaan dan kemakmuran bagi masyarakat (warga negaranya) dan mendapat ampunan Tuhan adalah merupakan syarat yang tepat dalam negara utama. Dengan demikian, antara al-Farabi dan Ibnu Bajjah lebih menekankan kebahagiaan dan ketentraman dalam suatu negara utama, hal ini tidak dapat dicapai dengan adanya kerjasama yang baik antara warga negara dan pimpinan negara.

B. Politik Kenegaraan

Sesungguhnya, tujuan yang dikehendaki Allah dengan menurunkan agama-agama adalah untuk menegakkan kebenaran

---

⁴ Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam, Bulan Bintang, Cet. III, Jakarta, 1992, hlm. 140.

dan mencegah permusuhan diantara manusia. Maka tujuan yang paling mendasar bagi semua agama samawi adalah mengukuhkan adanya keadilan sosial karenanya, mendirikan sebuah negara merupakan bagian dari ajaran agama, untuk mencapai salah satu tujuan yaitu keadilan sosial tadi, dengan menggunakan kekuatan politik. Di samping mimbar-mimbar dakwah dan tablik-tablik umum maupun khusus yang selalu kerja sama dengan kekuatan politik. Negara diartikan sebagai salah satu alat untuk meneruskan seruan agama.

Negara hendaknya berjuang untuk menegakkan agama dan menyebarkan tujuannya melalui berbagai tingkat pendidikan dan pengajaran. Negara juga mendengarkan pendapat umum dan wakil-wakil masyarakat dalam segala situasi dan kondisi, dengan menjaga setiap nuansa kehidupan manusia.

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat berkembang moril kecuali dalam ikatan negara. Maka, setiap negara harus memiliki seorang pemimpin agar segala urusan masyarakat dapat berjalan dengan teratur. Segalanya itu tidak mungkin terlaksana melainkan adanya seorang pemimpin didalam masyarakat itu, sehingga segala perbedaan pendapat, perpecahan dapat diatasi dan terciptanya keadilan-sosial.

pemimpin adalah pangkal utama dan penyebab pertama dari pada kegiatan, proses atau kesediaan untuk merubah pandangan atau sikap (mental fisik) dari pada kelompok

orang-orang baik dalam hubungan organisasi formal maupun informal.⁵

Dalam sistem al-Farabi dan Ibnu Bajjah, konstitusi harus disusun oleh kepala negara yang telah disamakan oleh al-Farabi dengan seorang Nabi atau filosof. Ibnu Bajjah tidak menyebutkan secara terperinci identitas ini, akan tetapi secara tidak langsung dia sangat setuju dengan pendapat al-Farabi. Hal itu ditegaskan dengan menyatakan, bahwa manusia tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali lewat yang di bawa oleh para rasul dari Tuhan Yang Maha Tinggi (yaitu hukum Tuhan). Mereka mengikuti petunjuk Tuhan, tidak akan sesat, oleh karena itu adalah lancang bila mengatakan bahwa Ibnu Bajjah mengabaikan edukatifnya bagi manusia sebagai warga negara.⁶

Nah, dari sini antara al-Farabi dan Ibnu Bajjah sependapat bahwa seorang pemimpin haruslah seorang nabi atau filosof, yang merenungkan kebenaran abadi, Jadi menerima pengetahuan langsung dari penyinaran akal fa'al. Berdasarkan itu ia memerintah secara absolut, tidak usah berunding dengan bawahan, mereka itu hanya menyebut pe -

---

⁵ Ek. Imam Munawir, Azaz-azaz Kepemimpinan dalam Islam, PT. Usaha Nasional, Cet. I, Surabaya, 1998. hlm. 13.

⁶ MM. Syarif, Para Filosof Muslim, PT. Mizan. Cet. V Jakarta, 1994. hlm. 166-167.

rintahnya.⁷

Oleh sebab itu, Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan Allah sebagai pengemban amanat, diantara amanat Allah yang dibebankan kepada manusia ialah agar memakmurkan kehidupan di bumi. Karena amanat mulianya manusia sebagai pengemban amanat Allah, maka manusia diberi kedudukan sebagai manajer bumi (kholifatullah, wakil Allah di bumi). Ada dua macam kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia yaitu : kekuasaan yang bersifat umum dari kekuasaan yang bersifat khusus, sedangkan kekuasaan yang bersifat umum adalah kekuasaan untuk memakmurkan kehidupan di bumi, kekuasaan khusus adalah kekuasaan dalam pemerintahan negara. Kekuasaan dalam pemerintahan negara dapat diberikan kepada negara-negara dan dapat pula diberikan kepada individu-individu. Kekuasaan yang diberikan kepada individu berupa pemimpin negara yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat.

Maka dengan adanya Nabi atau filsafat sebagai pemimpin suatu negara dan mendidik manusia agar memiliki akhlak yang mulia dapat terlaksana sehingga terciptanya suatu negara yang baik, aman, makmur dan sejahtera serta mencapai kebahagiaan yang abadi.

Dalam hal ini al-Farabi menambahkan apabila ti-

---

⁷ JWN. Bakker. Sy, Sejarah Filsafat Dalam Islam, PT Yayasan Kanisius, Cet. I, Yogyakarta, 1978. hlm. 37.

dak ada seorang nabi atau filosof, maka harus ada seorang yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Adapun syarat tersebut adalah kepala negara harus serba sempurna, secara moral, intelektual dan fisik. Ia mencintai kebenaran, keadilan berani mengambil keputusan tepat, tak tergoyah oleh emas, perak dan milik duniawi, jauh dari kesenangan jasmani, apabila berbakat panglima perang. Apabila tidak ada figur seperti tersebut di atas maka, al-Farabi memberikan alternatif dari idealisnya yang lain yaitu bisa digantikan dengan sistem presidium.⁸

Sedangkan sistem presidium adalah pemimpin tertinggi suatu badan yang terdiri atas beberapa orang yang berkedudukan sama, seperti Soveit tertinggi, badan pemegang, pelaksana kekuasaan eksekutif di Uni Soveit, di samping dewan menteri yang dikuasai oleh presiden. Adapun Ibnu Bajjah tidak memberikan syarat khusus untuk menjadi pemimpin, yang terpenting dapat memimpin suatu negara dan masyarakat dengan baik, dengan demikian dapat terwujud suatu negara yang makmur dan bahagia.

Persamaan dalam politik kenegaraan yang lain adalah Ibnu Bajjah menulis sebuah risalah kecil mengenai pemerintahan dewan negara dan pemerintahan negara kota, sebagai-

---

⁸ Muhammad Azhar, Filsafat Politik(perbandingan antara Islam dan Barat), PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I . Jakarta, 1996, hlm. 179.

mana yang dijelaskan dalam buku "Ilmu kalam Filsafat dan Tasawuf" karya Abuddin Nata bahwa Ibnu Bajjah sangat menyetujui teori politiknya al-Farabi yang membagi negara sempurna dan tidak sempurna, dia juga tidak menyetujui al-Farabi yang berpendapat bahwa individu yang berbeda-beda dari sebuah bangsa memiliki watak yang berbeda pula, sebagaimana dari mereka ada yang memerintah dan sebagian yang lain lebih suka diperintah.⁹

Tetapi Ibnu Bajjah memberikan tambahan kepada pendapat al-Farabi ketika ia memaksakan pendapatnya yang mengatakan manusia yang memerintah secara sendiri itu haruslah selalu berada lebih tinggi dari orang-orang lain yang diperintah dalam hal tertentu, meskipun menghindari dari orang-orang lain itu sendiri tidak diinginkan, namun hal itu diperlukan untuk mencapai kesempurnaan.¹⁰

Jadi, politik al-Farabi menyelidiki berbagai tindakan dan cara hidup, kecenderungan manusia, moral dan keadaan karakter yang menentukan tindakan dan cara hidup ini, tujuan yang mengarah pada tindakan dan cara hidup itu dilakukan dan bagaimana seharusnya keberadaan mereka pada manusia, politiknya juga membedakan tujuan - tujuan yang diduga, demikian meskipun sebenarnya bukan atas dasar uraian ini, dengan demikian politik al-Farabi berhubungan dengan ruang lingkup yang sangat luas mencakup

---

⁹ Abuddin Nata, Ilmu Kalam, Filsafat dan tasawuf PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, Cet. II, 1995, hlm. 106.

¹⁰ Ibid, hlm. 106.

manusia dan masyarakat manusia. Sedangkan Ibnu Bajjah, dia sependapat dengan apa yang dikatakan oleh al-Farabi karena kebanyakan dari pemikirannya mengenai politik dapat dipengaruhi dari al-Farabi bahkan, mendapat kehormatan besar ditangan Ibnu Bajjah, terbukti hampir sebagian pendapatnya mengenai politik sama dengan apa yang dikatakan oleh al-Farabi hanya Ibnu Bajjah lebih menekankan individu masyarakat dalam suatu negara.

Dari fenomena diatas, terlihat bahwa pemikiran kedua tokoh tersebut (al-Farabi dan Ibnu Bajjah) mengenai politik lebih cenderung pada suatu negara yang dipimpin oleh seorang raja. jadi, negara tersebut memakai sistem kerajaan, karena setiap tindakan, ucapan dan perintah seorang pemimpin harus dilaksanakan bahwa hanya (masyarakat) sehingga masyarakat tersebut harus tunduk dengan perkataan seorang raja (kepala negara).

C. Tentang Masyarakat

Pemikiran al-Farabi dan Ibnu Bajjah tentang masyarakat memiliki persepsi yang sama yaitu bahwa keduanya berpendapat masyarakat adalah makhluk sosial yang secara lahiriyah ia harus hidup dalam masyarakat.¹¹ Telah menjadi kodrat alam bahwa manusia itu sejak dahulu kala hidup bersama dengan manusia lain dalam suatu kelompok, dalam ke-

---

¹¹ Ahmad Daudy, Loc.Cit, hlm. 107

lompok itulah mereka berjuang mempertahankan hidupnya.

Pada mulanya, kelompok manusia itu mempertahankan hidupnya dengan mengadakan pemburuan, sehingga mereka selalu berpinda-pinda tempat kemudian dengan perkembangan peradaban mereka mulai menetap dan mempertahankan hidupnya dengan bercocok tanam, dari sinilah kehidupan bermasyarakat dimulai, yang memiliki polah-polah perbuatan atau polah-polah pemikiran yang dapat dimengerti maknanya oleh setiap anggota masyarakat itu.

Namun, dari persamaan pendapat kedua tokoh tersebut ada juga perbedaannya dimana, menurut al-Farabi sifat keistimewaan antara lain : adalah homosocius (suka bergaul), ini merupakan salah satu dorongan terwujudnya suatu masyarakat. Manusia berkumpul satu dengan yang lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidup mereka, manusia tidak mungkin memperoleh seluruh keperluan hidupnya kecuali dengan berkumpul antara satu dengan yang lainnya. Keperluan hidup manusia antara lain berupa makanan, pakaian dan perumahan. Karena itu pada tingkat pertama manusia yang telah berkumpul itu memerlukan empat jenis manusia : Petani, pembuat rumah, Penenun kain dan Tukang sepatu.¹²

Kemudian, masyarakat itu semakin maju dan ramai, kebutuhan hidupnya pun bertambah. Mereka memerlukan tambahan

---

¹² Abdul Qadir Djaelani, Op.Cit, hlm. 2.

empat macam manusia lagi : yaitu tukang kayu, tukang besi, pedagang besar dan pedagang eceran. Dengan lengkapnya jenis manusia seperti tersebut diatas masyarakat ~~men~~mencapai tingkatan yang sempurna, yaitu masyarakat kota. Setiap orang dalam masyarakat kota harus menyadari perlunya kerja sama yang teratur. Masing-masing harus berdiri ditempatnya masing-masing bekerja dan menghasilkan sesuatu menurut kependaiannya. Dengan kesadaran yang dihasilkannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kawan-kawannya didalam masyarakat mereka akan memperoleh imbalan yang dibutuhkan. Kerja sama dengan anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masing-masing adalah syarat mutlak untuk kebahagiaan masyarakat yang bersangkutan.¹³

Dengan demikian manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri atau secara individu karena tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara sesama manusia dalam suatu kelompok yang disebut dengan masyarakat. Namun, adakalanya manusia harus hidup menyendiri dari suatu masyarakat, kalau dalam suatu masyarakat tidak baik atau rusak.

Karena manusia adalah makhluk yang mempunyai sifat tengah antara sifat ketuhanan dan sifat kehewanan adalah

---

¹³ Ibid, hlm. 2.

baik jika manusia sedapat mungkin menempuh jalan ketuhanan dan hal itu tidak mungkin ditempuh, bisa dicapai kecuali, dengan hidup menyendiri. Seperti pendapat Ibnu Bajjah yang mengatakan bahwa jika masyarakat tidak baik maka seseorang harus menyepi hidup didalam menara gading, merenungkan berbagai ilmu teoritis. Karena dengan cara begitu dapat berhubungan dengan akal fa'al.¹⁴ Tetapi Ibnu Bajjah juga menasehati agar seseorang menemui masyarakatnya hanya beberapa kesempatan tertentu dalam waktu sebentar saja dan dia juga harus pinda kenegara-negara tempat ia memperoleh ilmu pengetahuan, perpindahan itu harus dilakukan dibawah hukum hukum ilmu politik. Sebab apabila manusia memperhatikan sesuatu dengan seksama atau memikirkan segala yang tampak berbeda disekelilingnya atau apasaja yang terdengar diseluruh pelosok bumi ini, niscaya akan menemukan. Bahwa pendapat saling pengaruh dan saling berkaitan pada seluruh yang maujud dibumi ini akan diperoleh pula, bahwa setiap tindakan, sistem dan peraturan selalu saja merupakan sebab atau bentuk peraturan, walaupun pada akhirnya tidak tampak keterkaitannya.¹⁵

Ibnu Bajjah juga menjelaskan bahwa masyarakat manusia itulah yang mengalahkan perseorangan dan melumpuhkan

---

¹⁴ Ibrahim Madkor, Filsafat Islam (metode dan penerapan) PT. Raja Grafindo Persada, Cet. III, Jakarta, 1993, hlm. 54 - 55.

¹⁵ Abdul Ghofar Aziz, Islam Politik Pro dan Kontra, PT. Postel Risdane, Cet. I, Jakarta, 1992, hlm. 229.

kemampuan - kemampuan berpikir, serta menghalang-halangi dari kesempurnaan melalui keburukan-keburukan yang membanjiri dan keinginan-keinginan yang deras. Jadi, seseorang dapat mencapai tingkat kemulyaan setinggi-tingginya melalui pikiran dapat menguasai perbuatan-perbuatan seseorang yang mengabdikan diri untuk memperolehnya.¹⁶

Selanjutnya dalam Risalatul-Ittishal Ibnu Bajjah membagi manusia dalam tiga golongan, yang telah dikutip oleh Ahmad Fuad al-Ahwani dalam bukunya Filsafat Islam yaitu :

1. Kaum awam (al-Jumhur), dapat menjangkau gambaran yang masuk akal lewat penglihatannya pada alam nyata atau ketergantungannya pada alam wujud.
2. Kaum Khawas atau kaum cendikiawan (an-Nadzar), berhubungan dengan soal-soal yang masuk akal lebih dulu, barulah kemudian mereka berhubungan dengan alam nyata.
3. Kaum yang bahagia, jumlahnya amat sedikit ialah mereka yang berhubungan langsung dengan segala yang masuk akal, mereka adalah orang-orang yang dapat melihat segala sesuatu dengan jiwa (rohaninya).¹⁷

Dari kenyataan yang ada, walaupun manusia hidup menyendiri, namun pada akhirnya nanti akan kembali kepada masyarakat juga, guna hidup berkelompok dan bekerjasama sa-

---

¹⁶ Ahmad Hanafi, Penyusun Filsafat Islam, PT. Bulan Bintang, Cet. V, Jakarta, 1991, hlm. 158.

¹⁷ Ahmad Fuad al-Ahwani, Filsafat Islam, PT. Pustaka Firdaus, Cet. III, Jakarta, 1995, hlm. 101.

ling membantu satu dengan yang lain dan ini sudah menjadi sifat manusia yang alami sejak lahir yaitu membutuhkan orang lain.

Plato dalam "Republika" nya, yang menjelaskan tentang keadaan suatu negara, hubungannya antara rakyat dan penguasanya, dirujuk oleh al-Farabi dalam pemikiran kefilsafatan etika dan ilmu politiknya.

Ilmu politik dan etika dipahaminya sebagai suatu perluasan atau perkembangan metafisika atau sebagai manifestasinya yang tertinggi yaitu teologi,¹⁸ yang melukiskan organik manusia dalam hubungan dengan tuhan dan alam semesta dan dengan sesama manusia, seperti yang diwujudkan dalam kepercayaan Islam. Pemikiran kefilsafatan al-Farabi tentang politik ini, ditegaskannya dalam uraian "Negeri Utama" nya مبادئ وآراء أهل المدينة الفاضلة (Mabādiu āraū ah - lil madīnatil fāzilah). Ia menguraikan bahwa negara terbaik adalah negara yang dikepalai oleh seorang rasul. Tetapi karena masa rasul telah berlalu, maka ada negeri terbaik kelas dua yang dikepalai oleh seorang filosof.¹⁹ al-Farabi berpendapat bahwa tidak semua warga negara mampu dan dapat menjadi kepala negara. Menurutnya kepala negara

---

¹⁸ Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam, Pustaka Jaya, Bulan Bintang, 1986. hlm. 175.

¹⁹ Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Segala Aspeknya, Bulan Bintang, Jakarta, 1974. hlm. 105.

diada kan lebih dahulu baru kemudian rakyatnya.²⁰ Untuk itu al-Farabi memberikan beberapa syarat kepada calon pemimpin negara yang diharapkan mempunyai kualitas yang luhur yang ada dua belas syarat.

Al-Farabi menginginkan suatu tatanan negara, dimana semua warganya mempunyai etika kenegaraan yang baik terpuji yang diharapkan dapat memperkuat negara demi mempertahankan keadilan. Dan keadilan ini baru dapat dilaksanakan, bila dalam kemenangan.²¹ Sebagaimana Plato yang menempatkan kebajikan dan kebaikan tertinggi dalam kehidupan berne-gara, sehingga negara ideal baginya adalah suatu "komuni-tas etikal".²² Didalam negara idealnya berkomunitas etikal tersebut, mengharuskan setiap warga negara bertanggung ja-wab untuk saling mengisi, saling menukar jasa, saling mem-perhatikan dan saling membangun.²³ Sementara al-Farabi mem-bahasnya dengan mengibaratkan dengan tubuh manusia yang u-tuh dan sehat, yang semua organ dan anggota badannya be-kerja sama sesuai dengan tugasnya masing-masing, yang ter-koordinasi oleh organ pokok yang berperan sebagai penentu, pelaksana lancarnya kesempurnaan hidup tubuh tersebut. Or-gan tubuh yang dimaksud adalag jantung sebagai organ pokok yang bekerja sama dengan organ tubuh lainnya.

---

²⁰ Munawir Syadjali MA, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran, UI. Press, Jakarta, 1990 hlm. 55.

²¹ Poerwantana dkk, Seluk Beluk Filsafat Islam, Rema-ja Rosda Karya, Bandung, 1993, hlm. 140.

²² J.H. Raper Th. Ph.D., Filsafat Politik Plato, Raja-wali Pers, Jaka rta, 1991, hlm. 59.

²³ Munawir Syadjali, Op.Cit, hlm. 53.

D. Persamaan dan Perbedaan Filsafat Politik

1. Persamaan secara ringkas kedua tokoh tersebut adalah :
  - a. Negara utama menurut al-Farabi dan Ibnu Bajjah adalah negara yang mampu menciptakan kebahagiaan dan kemakmuran warga negaranya dan mendapat ampunan Tuhan
  - b. Seorang pemimpin negara adalah nabi atau filosof,
  - c. Adanya masyarakat sempurna dan tidak sempurna.
  - d. Kebahagiaan, kemakmuran dan perdamaian untuk kepentingan rakyat adalah tujuan negara.
2. Perbedaan secara ringkas dari dua tokoh adalah :
  - a. Politik al-Farabi menekankan pengaturan negara (teknis masyarakat).
  - b. Sedangkan Ibnu Bajjah menekankan pada masyarakat dan penduduk.
  - c. "Penyendirian" dilakukan seseorang untuk menghindari masyarakat yang jelek (sebuah alternatif).
  - d. Menurut Ibnu Bajjah tidak adanya identitas atau Syarat tertentu bagi seorang kepala negara.
  - e. Adanya syarat tertentu atau kualitas yang luhur bagi seorang kepala negara, menurut al-Farabi.